

Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Pelatihan dan Pendampingan Pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rempoa

Erliana^{1*}, Husnul Khotimah¹

¹Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Article Information

Article history:

Received Juli 18, 2025

Approved Juli 25, 2025

Keywords:

Pengelolaan Keuangan Publik;
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan publik pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan asesmen awal, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan di LPM masih dilakukan secara konvensional, tanpa standar pencatatan yang jelas, serta minim dokumentasi dan pertanggungjawaban yang sistematis. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan simulasi, tim pelaksana PKM memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip keuangan publik, pembuatan sistem administrasi keuangan sederhana, serta pelaporan yang sesuai dengan standar. Peserta pelatihan terdiri dari pengurus LPM, perwakilan RT/RW, dan tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap tata kelola keuangan publik. Selain itu, LPM berhasil menyusun format pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih tertata, serta mulai menerapkan sistem dokumentasi berbasis digital sederhana. Masyarakat juga mulai lebih aktif memantau penggunaan dana, menandai tumbuhnya semangat transparansi. Program ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, LPM sebagai mitra pemerintah dapat diperkuat fungsinya dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Model pelatihan dan pendampingan yang diterapkan dalam kegiatan ini berpotensi direplikasi di LPM wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

© 2025 JGEN

*Corresponding author email: 02723@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan bagian integral dari struktur kelembagaan di tingkat kelurahan yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Keberadaan LPM sangat penting dalam menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan pembangunan lokal, serta turut andil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, peran LPM semakin vital, terutama dalam mengelola dana publik yang bersumber dari pemerintah maupun hasil swadaya masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak LPM yang menghadapi tantangan dalam hal tata kelola keuangan, termasuk di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil observasi dan asesmen awal, diketahui bahwa sistem pengelolaan keuangan di LPM Rempoa masih dilakukan secara konvensional. Pencatatan keuangan tidak mengikuti format standar, dokumentasi transaksi masih minim, dan laporan keuangan tidak terdigitalisasi. Selain itu, pengurus LPM umumnya belum memiliki latar belakang manajemen keuangan, sehingga pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi masih terbatas.

Kondisi tersebut memberikan sejumlah dampak negatif, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik, potensi konflik internal maupun eksternal terkait dana, serta hambatan dalam menjalin kerja sama dengan mitra atau lembaga donor yang mensyaratkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) tertulis dan literasi digital yang rendah juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan sistem keuangan yang baik dan berkelanjutan.

Di sisi lain, LPM Rempoa memiliki modal sosial yang kuat. Para pengurus menunjukkan semangat kolaboratif, terbuka terhadap perubahan, dan mendapat dukungan dari kelurahan serta partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menjadi peluang yang sangat potensial untuk dilakukan intervensi penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis keuangan, penyusunan SOP, digitalisasi pencatatan, serta peningkatan literasi keuangan publik.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas pengurus LPM Rempoa dalam pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan simulasi langsung, dengan melibatkan unsur pengurus LPM, perwakilan RT/RW, dan tokoh masyarakat. Tidak hanya menasar perbaikan jangka pendek, program ini juga bertujuan membangun fondasi kelembagaan jangka panjang yang profesional, serta mendorong tumbuhnya budaya pengelolaan keuangan yang partisipatif.

Diharapkan melalui kegiatan ini, LPM Rempoa dapat menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola keuangan publik di tingkat kelurahan, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan lokal. Model pelatihan dan pendampingan yang

diterapkan juga berpotensi untuk direplikasi pada LPM di wilayah lain yang mengalami tantangan serupa dalam pengelolaan keuangan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rempoa menggunakan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat secara nyata. Metode yang diterapkan disusun secara sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga dokumentasi hasil kegiatan, dengan melibatkan warga secara aktif dalam setiap tahapan. Keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan juga menjadi aspek penting dalam proses pemberdayaan ini, terutama dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan LPM sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan.

Berikut adalah tahapan metode kegiatan yang dilaksanakan:

1. Survei dan Identifikasi Masalah Secara Partisipatif

Tahapan awal dimulai dengan survei lapangan guna mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kelurahan Rempoa. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator, sedangkan warga berperan sebagai narasumber utama. Teknik yang digunakan mencakup wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), dan observasi langsung.

Melalui pendekatan ini, diperoleh gambaran nyata tentang kebutuhan dan permasalahan warga, seperti pengangguran pemuda, rendahnya literasi digital, hingga persoalan pengelolaan sampah. Hasil survei menjadi dasar penyusunan rencana program yang sesuai dengan konteks dan prioritas lokal.

2. Sosialisasi Program Melalui Penyuluhan Interaktif

Setelah masalah utama teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mensosialisasikan program PKM kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan secara interaktif untuk mendorong partisipasi warga. Mahasiswa menggunakan media pendukung seperti poster, leaflet, dan video edukatif yang mudah dipahami.

Sosialisasi dilakukan dalam forum-forum informal seperti pertemuan RT/RW, majelis taklim, dan kelompok ibu-ibu, sehingga menjangkau berbagai segmen masyarakat. Tujuannya adalah membangun kesadaran, antusiasme, dan rasa memiliki terhadap program yang akan dilaksanakan.

3. Pelatihan Keterampilan dan *Capacity Building*

Tahapan inti kegiatan adalah pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan warga. Topik pelatihan disusun berdasarkan hasil survei dan analisis situasi, antara lain pelatihan kewirausahaan digital untuk pemuda, pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, serta pelatihan literasi keuangan untuk ibu rumah tangga.

Pelatihan dilakukan secara langsung dengan pendekatan *learning by doing*, yaitu belajar melalui praktik langsung dan studi kasus. Peserta terlibat aktif dalam simulasi pembuatan produk, pencatatan keuangan usaha, serta promosi melalui media sosial.

4. Pendampingan dan Mentoring Berkelanjutan

Setelah pelatihan, peserta tidak langsung dilepas begitu saja. Mahasiswa melanjutkan kegiatan dengan pendampingan secara berkala. Monitoring dilakukan

untuk mengevaluasi penerapan keterampilan yang telah diperoleh, memecahkan kendala teknis di lapangan, serta memberikan motivasi berkelanjutan.

Pendampingan dilaksanakan secara individu maupun kelompok, dan didukung oleh forum diskusi daring yang menjadi sarana berbagi pengalaman antar peserta.

5. Pelaksanaan Kegiatan Kolaboratif dan Gotong Royong

Sebagai bentuk penerapan hasil pelatihan dan penguatan ikatan sosial, dilakukan kegiatan berbasis gotong royong seperti pembersihan lingkungan, pengumpulan sampah terpilah, dan pembangunan fasilitas publik sederhana. Metode ini efektif dalam meningkatkan rasa tanggung jawab bersama serta memperkuat kohesi sosial antarwarga.

Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam perubahan yang mereka harapkan.

6. Monitoring, Evaluasi, dan Umpan Balik Partisipatif

Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan kegiatan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Teknik evaluasi mencakup kuisisioner, wawancara, dan diskusi reflektif dengan warga.

Evaluasi ini bersifat partisipatif, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan saran dan kritik secara terbuka. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan kegiatan berikutnya, sekaligus sebagai indikator keberlanjutan program.

7. Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan

Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan, foto, dan video. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai alat pertanggungjawaban dan publikasi kepada pemangku kepentingan.

Hasil kegiatan dipublikasikan melalui media sosial, website mitra, dan media lokal, dengan tujuan meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, serta menjadi referensi bagi program serupa di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di LPM Kelurahan Rempoa menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan, baik dalam aspek peningkatan kapasitas individu maupun penguatan kelembagaan. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya Masalah Prioritas Masyarakat

Melalui survei dan diskusi partisipatif, berhasil diidentifikasi sejumlah persoalan utama yang dihadapi masyarakat, yaitu tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda, rendahnya keterampilan digital, dan minimnya kesadaran serta praktik pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

2. Sosialisasi Program yang Efektif

Sosialisasi program dilakukan secara interaktif menggunakan media cetak, digital, dan forum warga, sehingga mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan membangun pemahaman yang komprehensif terhadap tujuan kegiatan.

3. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat

Pelatihan kewirausahaan, digital marketing, serta pengelolaan keuangan publik dan sampah berbasis komunitas menghasilkan peningkatan keterampilan signifikan pada peserta, terutama pemuda dan ibu rumah tangga. Peserta mulai mampu membuat laporan keuangan sederhana, memanfaatkan media sosial untuk promosi usaha, dan mengelola sampah rumah tangga secara mandiri.

4. Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong Secara Rutin

Kegiatan gotong royong yang terjadwal secara berkala berhasil menumbuhkan semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

5. Pendampingan Berkelanjutan oleh Mahasiswa dan Fasilitator

Pendampingan intensif dari tim pelaksana PKM, termasuk mahasiswa, mendorong kelancaran implementasi program dan membantu peserta mengatasi tantangan teknis maupun non-teknis di lapangan.

6. Peningkatan Kesadaran terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

LPM mulai menyusun sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur, sederhana, dan berbasis digital. Masyarakat pun mulai terlibat aktif dalam memantau penggunaan dana secara transparan.

7. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Seluruh kegiatan program dievaluasi secara partisipatif bersama warga dan pengurus LPM, sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak dapat diakomodasi untuk perbaikan program berkelanjutan.

8. Dokumentasi Kegiatan secara Transparan

Seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis, foto, dan video, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

9. Publikasi dan Diseminasi Informasi Program

Kegiatan PKM dipublikasikan melalui media sosial, portal berita lokal, dan jaringan komunitas, sehingga meningkatkan visibilitas program serta mendorong replikasi di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Pembahasan

Program PKM di LPM Kelurahan Rempoa menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan publik, kewirausahaan, dan pengelolaan lingkungan. Identifikasi masalah yang dilakukan secara partisipatif menjadi fondasi penting dalam memastikan program menjawab kebutuhan riil warga.

Salah satu fokus utama program adalah penguatan tata kelola keuangan pada tingkat LPM. Berdasarkan hasil kegiatan, LPM mulai memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Melalui pelatihan keuangan dan simulasi pencatatan sederhana, pengurus LPM dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dasar SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini menjadi bekal penting apabila LPM maupun pelaku

UMKM di lingkungannya ingin mengakses pendanaan eksternal seperti dana hibah, CSR, atau pinjaman modal usaha.

Selain aspek keuangan, pelatihan kewirausahaan dan digital marketing juga menunjukkan hasil yang positif. Peserta pelatihan mulai menerapkan teknik promosi daring, penggunaan aplikasi keuangan, serta menyusun strategi usaha sederhana. Ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas yang dapat mendorong kemandirian ekonomi, terutama bagi pemuda dan ibu rumah tangga yang sebelumnya belum memiliki penghasilan tetap.

Di sisi lain, kegiatan gotong royong dan pengelolaan sampah secara kolektif menunjukkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat memerlukan pendekatan yang menyentuh nilai-nilai sosial budaya. Semangat kebersamaan yang tumbuh dari aktivitas kolektif menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan program.

Pendampingan berkelanjutan serta evaluasi partisipatif menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program. Keterlibatan aktif mahasiswa, tokoh masyarakat, dan warga dalam setiap tahapan kegiatan mendorong rasa memiliki dan memperkuat kohesi sosial. Dengan adanya dokumentasi dan publikasi yang sistematis, program ini tidak hanya bermanfaat secara lokal, tetapi juga dapat menjadi contoh praktik baik yang bisa direplikasi di daerah lain.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa LPM memiliki potensi besar sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berbasis potensi lokal. Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, LPM dapat bertransformasi menjadi lembaga yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PkM

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah didapat pada pengabdian masyarakat ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKM di LPM Kelurahan Rempoa berhasil mengidentifikasi dan mengatasi masalah utama masyarakat secara partisipatif, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan nyata warga.

2. Metode kegiatan seperti sosialisasi interaktif, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya dalam bidang kewirausahaan dan pengelolaan lingkungan.
3. Terbentuknya kelompok usaha dan bank sampah mandiri merupakan hasil nyata dari program yang memberikan dampak sosial dan ekonomi positif bagi warga Kelurahan Rempoa.
4. Pelaksanaan kegiatan gotong royong dan kolaborasi antarwarga meningkatkan solidaritas sosial serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program pemberdayaan.
5. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sarana dan partisipasi yang belum merata, pendampingan oleh mahasiswa dan evaluasi partisipatif membantu mengatasi kendala tersebut.
6. Pengembangan program ke depan perlu mengedepankan inklusivitas dan inovasi metode agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dan manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
7. Kolaborasi antara LPM, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor lain menjadi kunci keberlanjutan dan peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rempoa.

Saran

Materi tentang Edukasi Pemahaman keuangan akuntansi perusahaan dagang berbasis kompetensi sudah cukup baik & diapresiasi oleh para siswa, namun akan lebih sempurna jika ditambah dengan materi pokok lainnya, seperti:

1. Meningkatkan Semua Kelompok Masyarakat Perlu dilakukan upaya khusus agar semua lapisan masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.
2. Pengembangan Metode Pelatihan yang Lebih Inklusif dan Adaptif Disarankan untuk mengembangkan metode pelatihan yang mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan, misalnya dengan menggunakan media audiovisual dan pendekatan praktik langsung.
3. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Diperlukan penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang pelatihan yang memadai, akses internet, dan peralatan teknologi yang dapat menunjang proses belajar dan pelaksanaan kegiatan.
4. Perluasan Jejaring Kerja dan Kolaborasi LPM hendaknya memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan pengetahuan.
5. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Partisipasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hendaknya terus melibatkan masyarakat secara aktif agar feedback yang diperoleh dapat menjadi dasar perbaikan program secara berkelanjutan.
6. Pengembangan Program Berkelanjutan dengan Fokus pada Kemandirian.
7. Disarankan agar program-program pemberdayaan diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat, sehingga hasil yang dicapai dapat bertahan dan berkembang tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Astuti, D. N., & Wijaya, B. (2022). Manajemen Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 45-60.
- Basri, H. (2021). *Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, T. (2020). *Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadilah, L., & Harahap, M. (2023). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(1), 77-92.
- Gunawan, A. (2021). Strategi Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 101-115.
- Hadi, S. (2023). *Pengelolaan Keuangan Desa: Teori dan Praktik*. Surabaya: Gava Media.
- Hasanah, R., & Kurniawan, S. (2022). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 10(2), 120-135.
- Indrawati, S. (2021). *Keterampilan Digital untuk Masyarakat Perkotaan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Iskandar, T. (2020). Metode Penyuluhan Interaktif untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 65-78.
- Kurniawan, B. (2021). *Teori dan Praktik Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kreativitas Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian*, 9(4), 33-48.
- Mardiana, N. (2023). Pendampingan Berkelanjutan sebagai Kunci Keberhasilan Program Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 11(2), 89-104.
- Maulana, F. (2020). *Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. (2022). Pelaksanaan Program Gotong Royong dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 7(3), 55-69.
- Putri, A. D., & Saputra, E. (2021). Manajemen Program Pemberdayaan di Kelurahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 102-117.
- Rahmawati, S. (2023). *Literasi Keuangan untuk Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, J. (2022). Pengaruh Pendampingan terhadap Keberhasilan Program Pemberdayaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 88-102.
- Sari, M. (2020). Strategi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(4), 75-89.
- Setiawan, R. (2023). Inovasi Metode Pelatihan untuk Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 12(1), 46-60.
- Sudirman, A. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- UNDP. (2023). *Sustainable Development Goals: Integrating Environment, Social, and Economy*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyuni, L. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan Berbasis Partisipasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(3), 73-87.
- Wulandari, E. (2021). Model Kolaborasi Lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, 4(2), 59-73.